



Mengukur Pengaruh Kapasitas Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat Melalui Belanja Bantuan Sosial

Achmad Fajar Putra*, Yuliarti

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian memiliki tujuan untuk mendeskripsikan sejauh mana pengaruh belanja bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif asosiatif. Data yang diaplikasikan adalah data panel memuat observasi 19 kabupaten/kota dan runtut waktu 2007-2023 dengan teknik *total sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan belanja bantuan sosial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan signifikansi 0,0000. Nilai koefisien determinasi Adjusted R Square sebesar 0,133 yang artinya tingkat kemiskinan diuraikan sebesar 13% oleh variabel belanja bantuan sosial, sedangkan 87% adalah aspek lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

Kata Kunci: Belanja Bantuan Sosial, Tingkat Kemiskinan, Data Panel

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.2829>

*Correspondence: Achmad Fajar Putra

Email:

putraachmadfajar@gmail.com



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *The study aims to describe the extent of the influence of social assistance spending on the poverty rate in West Sumatra Province. The method used is a quantitative associative approach. The data applied is panel data, consisting of observations from 19 districts/cities over the period 2007–2023, using a total sampling technique. The results of this study show that social assistance spending has a significant effect on the poverty rate, with a significance value of 0.0000. The Adjusted R Square value is 0.133, which means that 13% of the variation in the poverty rate is explained by social assistance spending, while the remaining 87% is attributed to other factors not examined in this study.*

Keywords: Social Assistance Spending, Poverty Level, Panel Data

Pendahuluan

Komitmen global terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) terus diperkuat sebagai lanjutan dari program *Millennium Development Goals* (MDGs). Salah satu tujuan utama dalam SDGs adalah penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya (Hasibuan, 2023). Indonesia sebagai negara berkembang turut berkontribusi melalui kebijakan nasional dan pernyataan konstitusional. Kemiskinan terdiri dari beberapa jenis diantaranya struktural, relatif, kultural dan absolut (Hendra Sinambela et al., 2024). Dengan demikian, konstitusi mengamanatkan keterlibatan negara dengan membangun sistem pengamanan sosial dan memfasilitasi masyarakat yang tidak mampu dalam hak-hak dasarnya (Nawir, 2022).

Meskipun secara nasional tren kemiskinan mengindikasikan pengurangan dari 10,14% pada tahun 2021 menjadi 9,03% pada tahun 2024, hal yang berbeda justru terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan publikasi dari BPS, tingkat kemiskinan di provinsi ini mengalami peningkatan dari 5,92% pada tahun 2022 menjadi 5,97% pada 2024. Fenomena ini menjadi anomali dibandingkan provinsi lain di Sumatera yang secara umum mengalami penurunan angka kemiskinan. Kondisi ini menandakan adanya disparitas regional dan kemungkinan lemahnya efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat daerah.

Salah satu kebijakan utama yang dijalankan dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah belanja bantuan sosial (bansos). Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau Jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan atau kesejahteraan masyarakat. yang pendanaanya dari APBN maupun APBD (Triyulianto et al, 2024). Beberapa studi terdahulu telah meneliti pengaruh belanja bansos dan tingkat kemiskinan. Penelitian Gusti Pratiwi et al. (2022) di Kabupaten Langkat, berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Meysinta dan Aini (2025) dalam penelitiannya di Provinsi Sumatera Barat, belanja bantuan sosial berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya, penelitian Nabilah dan Sugiri (2022) di Provinsi Sumatera Selatan dan penelitian Sendouw et al. (2019) di Kota Manado, menyimpulkan belanja bansos tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Pada tingkat daerah, belanja bansos bersifat opsional namun strategis, dan diatur melalui regulasi seperti Permendagri Nomor 13 Tahun 2018. Di Provinsi Sumatera Barat, alokasi belanja bansos telah dilakukan secara konsisten sejak 2007, dan dalam beberapa tahun terakhir jumlahnya tergolong cukup besar. Namun demikian, fluktuasi antara belanja bansos dan angka kemiskinan yang cenderung stagnan bahkan meningkat menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah belum optimal dalam mengatasi kemiskinan secara struktural.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Sumatera Barat 2025–2045, pemerintah daerah menargetkan tingkat kemiskinan dalam rentang 3,35%–3,85% pada tahun 2025 dan 0,04%–0,29% pada tahun 2045 (Bappeda, 2024). Target ini terbilang ambisius, mengingat peningkatan kemiskinan masih terjadi, yang menandakan perlunya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan, khususnya pengelolaan belanja bantuan sosial. Faktor politis turut memengaruhi alokasi bansos, terutama pada tahun politik (Setiawan & Setyorini, 2018). Secara sosiologis, bantuan yang bersifat jangka pendek belum menyentuh akar struktural kemiskinan (Suyono, 2022).

Sebagian besar studi terdahulu berfokus pada konteks daerah lain dengan pendekatan ekonomi makro atau pembangunan. Selain itu, variasi hasil empiris di mana sebagian studi menunjukkan pengaruh tidak signifikan atau bahkan berlawanan arah dengan teori menunjukkan bahwa masih terdapat inkonsistensi dalam efektivitas bansos sebagai instrumen fiskal daerah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian dalam menjelaskan bagaimana kapasitas fiskal daerah, melalui belanja bantuan sosial,

berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan di tingkat lokal.

Novelty kajian ini terletak pada pendekatan keuangan publik dalam perspektif administrasi publik serta hingga kini belum adanya observasi terkait belanja bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dengan rentang waktu 2007-2023. Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dengan perspektif fiskal daerah, serta mengangkat isu efektivitas kebijakan bansos di tengah fenomena peningkatan kemiskinan daerah, meskipun secara nasional mengalami penurunan.

Metodologi

Jenis pendekatan penelitian adalah kuantitatif. Menurut Karimuddin (2022) pendekatan kuantitatif ialah pendekatan yang terstruktur dalam melihat fenomena dikaji melalui pengumpulan data kuantitatif yang dapat dianalisis menggunakan metode statistik, matematis, atau komputasional. Kajian ini menekankan kuantitatif asosiatif bermaksud untuk mengeksplorasi pengaruh dan keterkaitan sebab-akibat diantara variabel dengan membuktikan korelasi antar variabel.

Populasi pada kajian ini seluruh kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Barat. Metode penentuan sampel yang diterapkan adalah total sampling atau sampel jenuh bagian dari kelompok non-probability sampling, yaitu ketika seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sahir, 2021:34-36). Hal ini dimungkinkan karena data sekunder yang digunakan mencakup keseluruhan daerah pada Provinsi Sumatera Barat periode 2007–2023, sehingga tidak diperlukan proses pengambilan sampel secara acak atau terbatas.

Teknis dan Metode Analisis Data

Panel Data merupakan tipe data yang diberlakukan pada kajian ini yang menghimpun observasi 19 kabupaten/kota rentang 2007 sampai dengan 2023 (Sugiyanto et al, 2022). Data Panel diolah menggunakan bantuan program software *Eviews13*. Metode tersebut diaplikasikan untuk menguji sejauhmana pengaruh belanja bantuan sosial (X) terhadap tingkat kemiskinan (Y).

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode untuk menyederhanakan data penelitian agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Data disajikan dalam bentuk ringkasan melalui tabulasi, baik dalam format numerik maupun grafik (Wahyuni, 2020).

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Indikator	Tingkat Kemiskinan	Belanja Bantuan Sosial
Mean	7.715573	5,251,366,144.340555
Median	7.120000	2,950,150,000
Maximum	22.86000	103,398,943,163
Minimum	1.940000	0
Standard Deviation	3.471655	10,473,569,669.68516
Skewness	1.227795	6.028212624604411
Kurtosis	5.096258	47.14426
Jarque-Bera	140.2926	28182.73
Probability	0.000000	0
Sum	2492.130	1,696,191,264,622

Indikator	Tingkat Kemiskinan	Belanja Bantuan Sosial
Sum Sq. Dev.	3880.869	3.532200304349116e+22
Observations	323	323

Merujuk pada Tabel 1, rata-rata nilai belanja bansos direalisasikan sebesar Rp5,25 miliar per tahun, dengan nilai tengah (median) sebesar Rp2,95 miliar. Nilai maksimum mencapai Rp103,39 miliar, sedangkan nilai minimum tercatat Rp0. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya dinamika yang cukup besar dalam realisasi belanja bantuan sosial antar daerah. Sementara itu, rata-rata tingkat kemiskinan berada pada angka 7,72% per tahun, dengan nilai median 7,12%. Tingkat kemiskinan tertinggi tercatat sebesar 22,86%, dan yang terendah sebesar 1,94%, yang mencerminkan perbedaan kondisi kesejahteraan di berbagai wilayah.

Transformasi pada variabel belanja bantuan sosial penting dilakukan karena skala datanya sangat besar, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam analisis. Transformasi, seperti logaritma, membantu memperkecil skala agar hubungan antar variabel lebih proporsional. Selain itu, terdapat nilai nol pada beberapa observasi yang tetap bermakna, karena menunjukkan tidak adanya realisasi belanja bansos di daerah tertentu. Jika tidak ditangani, nilai nol ini bisa hilang dalam proses estimasi. Oleh karena itu, transformasi seperti $\log(x + 0,5)$ digunakan agar seluruh data tetap dapat dianalisis tanpa menghilangkan informasi penting (Gujarati, 2009).

Uji Chow

Uji Chow digunakan menetapkan apakah model yang lebih sesuai antara Fixed Effect (FEM) atau Common Effect (CEM). (Basuki, 2015). Hipotesis dalam uji chow adalah:

H0 : CEM

H1 : FEM

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	43.182018	(18,302)	0.0000
Cross-section Chi-square	410.610304	18	0.0000

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan nilai prob. dari Cross-section F yaitu 0.0000. Nilai tersebut rendah dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak dan model yang ditetapkan adalah FEM.

Uji Hausman

Uji Hausman merupakan metode statistik yang digunakan menentukan model Random Effect (REM) atau Fixed Effect (FEM) (Basuki, 2015). Hipotesis dalam uji hausman yaitu:

H0 : REM

H1 : FEM

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.896597	1	0.3437

Merujuk tabel 2 diperoleh prob. dari Cross-section random yaitu 0.3437. Nilai tersebut besar dari 0.05, sehingga H0 diterima dan model terpilih yaitu REM.

Uji Langrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk mengevaluasi apakah model Random Effect lebih sesuai dibandingkan model Common Effect (Basuki, 2015). Hipotesis uji Langrange Multiplier yaitu:

H0 : CEM

H1 : REM

Tabel 4. Hasil Uji LM

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1250.579 (0.0000)	50.53671 (0.0000)	1301.115 (0.0000)

Merujuk tabel 3, nilai prob. Cross-section Breusch-Pagan yaitu 0.0000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0.05, maka H0 ditolak dan model yang ditetapkan adalah REM. Setelah dilakukan pengujian, maka model yang terbaik adalah Random Effect Model (REM). Dalam Model Random Effects (REM), error term terdiri dari dua komponen, satu yang spesifik terhadap unit cross-section individu dan satu lagi yang bersifat idiosinkratik. Karena error term gabungan ini melanggar asumsi klasik, maka metode Generalized Least Squares (GLS) umumnya digunakan untuk memperoleh estimator yang efisien (Gujarati, 2009).

Regresi Data Panel

Regresi ini digunakan karena menyesuaikan pada karakteristik jenis data dalam penelitian ini. Formulasi regresi panel yaitu:

$$Y = \alpha + b_1 \cdot X + e$$

$$Y = 5.786768 + 0.104296 \cdot \text{LOG}_X + e$$

Berikut ini adalah penjelasan dari setiap komponen dalam persamaan regresi:

1. Nilai konstanta sebesar 5,786768 menunjukkan nilai awal dari variabel tingkat kemiskinan (dependen) ketika variabel belanja bantuan sosial (bebas) bernilai nol maka tingkat kemiskinan diperkirakan sebesar 5,79%. Konstanta ini berfungsi sebagai titik awal estimasi sebelum pengaruh variabel bebas dimasukkan ke dalam model.
2. Nilai Koefisien regresi yaitu 0,104296 mengindikasikan setiap penambahan 1 satuan dalam logaritma belanja bansos akan diikuti oleh kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 0,10%.

Cross section Effect

Cross section effect adalah pengaruh khusus dari masing-masing unit observasi yang mencerminkan karakteristik tidak teramati yang bersifat tetap antar waktu namun berbeda antar unit. Efek ini menjelaskan variasi variabel dependen yang tidak diterangkan oleh variabel independen (Gujarati, 2009).

Tabel 5. Hasil Crosssection Effect Model REM

1	Kab. Kepulauan Mentawai	8.112808
2	Kab. Pesisir Selatan	0.862597
3	Kab. Solok	2.916949
4	Kab. Sijunjung	0.981419
5	Kab. Tanah Datar	-2.366590
6	Kab. Padang Pariaman	1.423421
7	Kab. Agam	0.037956
8	Kab. Lima Puluh Kota	0.399229
9	Kab. Pasaman	2.260363
10	Kab. Solok Selatan	1.438526
11	Kab. Dharmasraya	0.903488
12	Kab. Pasaman Barat	1.073441
13	Kota Padang	-3.011950
14	Kota Solok	-3.360154
15	Kota Sawahlunto	-5.133679
16	Kota Padang Panjang	-1.370947
17	Kota Bukittinggi	-2.582314
18	Kota Payakumbuh	-0.076454
19	Kota Pariaman	-2.508107

Output estimasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh karakteristik khas tiap daerah (cross-section effect) terhadap variabel dependen pada setiap daerah Provinsi Sumatera Barat. Tiga daerah dengan nilai cross-section effect tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai (8,1128), Kabupaten Solok (2,9169), dan Kabupaten Pasaman (2,2604). Kondisi tersebut mendeskripsikan ketiga daerah tersebut mempunyai karakteristik khusus untuk mendorong tingginya tingkat kemiskinan, di luar pengaruh belanja bantuan sosial. Sebaliknya, tiga daerah dengan nilai cross-section effect paling rendah (negatif) adalah Kota Sawahlunto (-5,1337), Kota Solok (-3,3602), dan Kota Padang (-3,0120). Nilai negatif ini menunjukkan bahwa karakteristik unik dari daerah-daerah tersebut justru berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini dapat mencerminkan adanya kondisi sosial ekonomi yang lebih baik, seperti infrastruktur yang memadai, akses pendidikan dan kesehatan yang lebih luas. Oleh karena itu, hasil ini menegaskan bahwa strategi pengentasan kemiskinan tidak dapat bersifat seragam, melainkan perlu mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing wilayah.

Uji Parsial

Uji parsial digunakan menguji signifikansi masing-masing pengaruh variabel masing-masing independen terhadap variabel dependen. Jika nilai Sig<0.05 diartikan berpengaruh sedangkan nilai Sig>0.05 diartikan tidak berpengaruh (Sahir, 2021).

Tabel 6. Hasil Uji-t (Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.786768	0.741318	7.806052	0.0000
Log_X	0.104296	0.014661	7.113877	0.0000

Berdasarkan Tabel 5, maka diketahui bahwa variabel belanja bantuan sosial (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y). Merujuk nilai t-Statistic yaitu 7.113877, dengan tingkat signifikansi < 0.05 yaitu 0.0000. Kesimpulannya, belanja bantuan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan secara uji-t, dengan begitu H_a terpilih.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen. Jika nilainya rendah, maka kontribusi variabel independen terhadap dependen juga rendah. Akan tetapi, jika nilai mendekati 1 atau 100%, maka semakin besar kontribusinya (Sahir, 2021).

Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi

Weighted Statistics			
R-squared	0.136223	Mean dependent var	1.164908
Adjusted R-squared	0.133532	S.D. dependent var	2.010945
S.E. of regression	1.871873	Sum squared resid	1124.755
F-statistic	50.62356	Durbin-Watson stat	0.434608
Prob(F-statistic)	0.000000		

Menimbang tabel 7, nilai Adjusted R-squared adalah 0.133 atau 13%. Nilai tersebut mengasumsikan tingkat kemiskinan dijelaskan oleh variabel belanja bantuan sosial sebesar 13% dan sisanya sebesar 87% yaitu variabel yang belum ada dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Hasil pengolahan data penelitian menunjukkan variabel belanja bantuan sosial (X) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-statistic yaitu 7.113877 dengan signifikansi sebesar 0.0000 dimana kecil dari 0.05. Oleh karena itu, hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan ditolak, dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Regresi yang dihasilkan yaitu $Y = 5,786768 + 0,104296 \cdot \log(X) + e$. Nilai konstanta sebesar 5,786768 menunjukkan bahwa ketika nilai logaritma belanja bantuan sosial bernilai nol, maka tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada 5,79 persen. Ini merepresentasikan kondisi awal kemiskinan tanpa adanya pengaruh belanja bantuan sosial. Sementara itu, nilai 0,104296 menjelaskan setiap peningkatan satu satuan logaritma dari belanja bantuan sosial akan diikuti dengan peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 0,10 persen. Artinya,

hubungan antara belanja bantuan sosial dan kemiskinan justru bersifat positif, yang berarti peningkatan belanja sosial dikaitkan dengan meningkatnya angka kemiskinan.

Temuan ini dapat dianalisis secara mendalam melalui empat perspektif teori utama yang digunakan dalam penelitian ini, yakni Teori Keynesian, Teori Fungsi Distribusi dari Musgrave, Pendekatan Social Risk Management (SRM), dan Teori Kebijakan Publik William N. Dunn. Dalam kerangka Teori Keynesian, belanja bantuan sosial dipahami sebagai bagian dari intervensi fiskal pemerintah untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan permintaan agregat, terutama saat pasar gagal menyediakan kesempatan kerja dan distribusi pendapatan yang merata. Hasil regresi yang menunjukkan pengaruh signifikan dari belanja bantuan sosial memperkuat relevansi pendekatan Keynesian ini. Namun, arah positif dari koefisien regresi menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja sosial belum optimal, sehingga efek penggandanya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan (Keynes, 1936).

Dari sudut pandang Teori Musgrave, belanja bantuan sosial merupakan instrumen dari fungsi distribusi fiskal, yakni peran pemerintah dalam mengoreksi ketimpangan melalui transfer dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Seperti ditegaskan oleh Musgrave, distribusi ulang pendapatan melalui skema bantuan sosial mencerminkan upaya pemerintah untuk menjamin keadilan sosial. Oleh karena itu, temuan ini mencerminkan pelaksanaan dari fungsi distribusi, meskipun arah positif hubungan menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap ketepatan sasaran dan efektivitas program distribusi tersebut (Musgrave, 1989).

Dalam pendekatan Social Risk Management (SRM) yang dikembangkan oleh Bank Dunia, bantuan sosial tidak hanya dipandang sebagai jaring pengaman (safety net), tetapi juga sebagai landasan lompatan (springboard) untuk membantu kelompok miskin bertahan dari guncangan dan membangun kembali kapasitas ekonomi mereka. Dalam konteks ini, belanja bantuan sosial menjadi mekanisme coping strategis yang bertujuan memperkuat daya lenting (resilience) masyarakat miskin. Oleh karena itu, temuan penelitian ini mendukung pandangan SRM bahwa intervensi sosial yang tepat dapat memperbaiki kondisi ekonomi kelompok rentan, meskipun arah pengaruh positif mengindikasikan bahwa mekanisme coping yang ada belum sepenuhnya berjalan efektif (World Bank, 2001).

Dalam kerangka evaluatif Teori Kebijakan Publik Dunn, khususnya pada tahap evaluasi kebijakan, yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Dengan menggunakan kriteria evaluasi Dunn dapat dinilai bahwa meskipun terdapat pengaruh signifikan (efektivitas tercapai secara statistik), arah hubungan yang tidak sesuai harapan mengisyaratkan adanya masalah dalam aspek efisiensi, pemerataan, dan ketepatan kebijakan. Evaluasi ini memperlihatkan pentingnya memperbaiki desain dan implementasi kebijakan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan mampu menurunkan kemiskinan secara nyata (Dunn dalam Meutia, 2017).

Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara belanja bantuan sosial terhadap kemiskinan. Penelitian oleh Annisa Marni Melati et al. (2021) di Provinsi Jawa Barat menemukan bahwa belanja bantuan sosial berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Hal serupa juga

ditunjukkan dalam penelitian Sumiyarti (2022) yang menyatakan bahwa belanja bantuan sosial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien bertanda positif. Zania Ulfah Satari (2017) dalam kajiannya di Provinsi Jawa Tengah juga menemukan bahwa bantuan sosial berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Serta, Nurul Mudhiatil Mufliha (2018) dalam penelitian terhadap data Indonesia tahun 2013–2017 menyimpulkan bahwa belanja bantuan sosial tidak menurunkan, tetapi justru berkorelasi positif terhadap kemiskinan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditarik kesimpulan yaitu variabel belanja bantuan sosial (X) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y). Kepada pemerintah daerah khususnya pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, lebih mengoptimalkan pengelolaan dan penyaluran belanja bantuan sosial. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian dengan menggali variabel lain yang relevan.

Daftar Pustaka

- Bappeda. (2024). Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.
- Basuki, A. T. & Prawoto, N. (2015). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Gujarati, D. N. (2009). *Basic Econometrics*. Mc Graw Hill.
- Hasibuan, L. S. (2023). Analisis Pengaruh Ipm, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 8(1), 53–62. <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JP2SH/article/view/2075/1261>
- Karimuddin, A. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*.
- Melati, A. M., Sudrajat, & Burhany, D. I. (2021). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 422–430.
- Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik. Lampung: AURA (CV. Anugrah Utama Raharja)
- Meysinta, D. P., & Aini, Z. (2025). Pengaruh PAD, Pendapatan Transfer, Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2020-2023). 9(3), 817–831.
- Mufliha, N. M. (2018). Pengaruh Penyaluran Dana ZIS, Belanja Bantuan Sosial, Dan Belanja Subsidi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2013-2017. 128.
- Musgrave, R. A. (1989). *Public Finance In Theory And Practice*. McGraw-Hill International Editions

- Nabilah, R., & Sugiri, D. (2022). Apakah Bantuan Sosial dan Belanja Modal Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan? *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 21(1), 85–98. <https://doi.org/10.32639/fokbis.v21i1.115>
- Nawir, A., Syamsuddin, S., & Jusniaty, J. (2022). Penerapan Program Sustainable Development Goals (Sdgs) Desa Polewali Dalam Mengurangi Kemiskinan. *Demokrasi*, 1(3), 1–18. <https://doi.org/10.36269/dmkr.v1i3.784>
- Pratiwi, G., Safuridar & Martahadi. (2022). Pengaruh Belanja Bantuan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Langkat. *Akuntansi*, 1(4), 240–247. <https://doi.org/10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v1i4.126>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian* (M. S. Dr. Ir. Try Koryati (ed.)).
- Satari, Z. U. (2017). Pengaruh Upah, Bantuan Sosial, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011–2015. 1–118.
- Sendouw, A., Rumat, V. A., & Rotinsulu, D. C. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Belanja Sosial, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2), 1–15. <https://doi.org/10.35794/jpekd.15780.19.2.2017>
- Setiawan, D., & Setyorini, E. (2018). Dampak Pemilihan Kepala Daerah terhadap Alokasi Belanja Daerah. *Kajian Ekonomi Keuangan*, 2(2).
- Sinambela, H., Suryani, I., Sitinjak, R. B., Pasaribu, M. K. & Sihombing, T. P. (2024). Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia Pengangguran Terhadap Kemiskinan Disumatera Utara Tahun 2003-2022. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(2). <https://doi.org/10.62281/v2i2.174>
- Sugiyanto, Subagyo, E., Nugroho, W. C. A., Jacob, J., Berry, Y., Nuraini, A., Sudjono, & Syah, S. (2022). Konsep dan Praktik Ekonometrika Menggunakan Eviews. In *Academia Publication* (p. 179).
- Sumiyarti. (2022). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan. *Srikandi: Journal of Islamic Economic and Banking*, 1(1), 28–43. <https://doi.org/10.25217/srikandiv1i1.1335>
- Suyono, H. (2022). *Social Entrepreneurship Solusi Mengatasi Kemiskinan*. 7(1), 363–372.
- Triyulianto, T., Rizkia Nurvita, B. S., & Hidayaturahmi. (2024). Pengaruh Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Good Governance*, 111–128. <https://doi.org/10.32834/gg.v20i2.807>
- Wahyuni, M. (2020). *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian Olah Data Manual Dan SPSS Versi 25*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Medan
- World Bank. (2001). *Social Protection Sector Strategy*.